

STRATEGI PENGELOLAAN PERPARKIRAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO

Nur Rachma Istin Faridha, Titik Djumiarti, Triyuniningsih

Departemen Administrasi Publik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

Abstrak

Strategi Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Purworejo saat ini membutuhkan sinergitas antara berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan perparkiran dan mengidentifikasi tahapan perencanaan strategis. Metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan perparkiran yang dilakukan sebagian besar sudah berjalan secara maksimal. Penelitian sudah sesuai dengan tujuan peraturan pengelolaan perparkiran untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di tempat parkir, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Dinas Perhubungan melakukan pelatihan kerja untuk pegawai yang berstatus honorer supaya mampu mengikuti perkembangan teknologi meningkatkan kualitas pegawai dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pelayanan Parkir, Pengelolaan Perparkiran, Perencanaan Strategi

Abstract

The current parking management strategy in Purworejo Regency requires synergy between various parties. This research aims to analyze parking management strategies and identify strategic planning stages. Method with a qualitative descriptive approach. The results of this research show that the parking management strategies carried out have mostly been running optimally, this is proven by the strategies and programs carried out through planning with target determination, movements to ensure the smoothness and safety of parking services, movements for monitoring in the field and supervision carried out in two directions. Problems are still found in the strategic planning stage, including the internal environmental analysis stage regarding the resources available which is still not optimal because there are still many employees who have honorary status. The strategy formulation has not been implemented optimally because it has not yet switched to an e-parking system due to the minimal quantity of human resources. The research is in accordance with the objectives of parking management regulations to improve order, security and comfort in parking lots, so that it can provide great benefits to the community and local government. The recommendation that can be given is that the Transportation Department carries out job training for employees with honorary status so that they are able to keep up with technological developments to improve the quality of employees and provide maximum service to the community

Keywords: parking service, parking management, strategic planning

PENDAHULUAN

Pengelolaan perparkiran yang baik sangat dibutuhkan di semua fasilitas umum utamanya di kawasan yang padat penduduknya. Sistem pengelolaan perparkiran yang baik mencerminkan kebaikan ketersediaan fasilitas perparkiran. Fasilitas perparkiran yang diharapkan adalah keamanan, kemudahan, dan kenyamanan. Strategi merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap manusia, organisasi, perusahaan, dan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang terstruktur dan terencana untuk mencapai tujuan.

Parkir adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi. Semakin meningkatkan jumlah penduduk diikuti oleh meningkatnya tingkat kesejahteraan hidup dimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih konsumtif salah satunya dengan memiliki transportasi pribadi.

Selanjutnya terkait dengan SDG's, strategi pengelolaan perparkiran diintegrasikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 11 karena dengan adanya pengelolaan perparkiran yang baik dapat membantu menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi kemacetan lalu lintas, emisi karbon, dan menciptakan ruang yang lebih nyaman bagi penduduk kota. Dalam aspek SDG's terdapat 3 aspek yaitu, *smart city*, *green city*, dan *liveable city*. Penelitian ini masuk ke dalam aspek *liveable city* karena terdapat program yang dilakukan untuk implementasi SDG's di bidang transportasi dengan meningkatkan literasi jangka panjang seperti menyediakan akses sistem transportasi yang aman, andal, ramah pengguna, dan fleksibel bagi semua orang

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokus di Pemerintah Kabupaten Purworejo, tepatnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dengan fokus Strategi Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Purworejo.



Gambar 1. Fenomena Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kabupaten Purworejo

Sumber : Dokumen Pribadi

Permasalahan pengelolaan perparkiran masih banyak terjadinya parkir liar di tepi jalan umum kabupaten purworejo tepatnya di depan pasar baledono. Pada kawasan itu mempunyai kondisi badan jalan umum yang terbatas dan memiliki tingkat arus lalu lintas yang tinggi, oleh karena itu kawasan tersebut tidak seharusnya menjadi tempat parkir karena dengan parkir di badan jalan akan menimbulkan kemacetan. Kebutuhan tentang fasilitas tempat parkir yang dikelola Dinas Perhubungan seharusnya menyediakan tempat untuk parkir supaya kendaraan yang parkir mudah dipantau dan dapat menjadikan daya tarik Kabupaten Purworejo karena tidak parkir semrawut.

Kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada para petugas parkir dengan memberikan himbauan kepada petugas parkir agar dalam melaksanakan tugas pengelolaan parkir, tetap selalu berpedoman pada aturan yang berlaku, dengan memberi karcis pada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan selalu humanis untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan pada pelayanan perparkiran menjadi hal utama yang berhubungan dengan pengelolaan perparkiran terutama pada petugas parkir. Dikarenakan masih banyaknya juru parkir yang melanggar peraturan dalam karcis parkir yang disalahgunakan.

TINJAUAN TEORI

Administrasi Publik

Menurut Yeremias T Keban (2014:4), menunjukkan bagaimana peran pemerintah yang aktif dalam mengatur hal yang menurutnya berguna bagi kepentingan masyarakat. Maka Administrasi publik dapat disimpulkan sebagai upaya untuk menjalin kerjasama antara sekelompok orang dalam ruang organisasi atau instansi pemerintahan yang memiliki hubungan erat dengan tiga lembaga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan publik masyarakat juga mencapai pemerintahan yang baik. Administrasi publik didefinisikan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) sebagai cara untuk mengelola kemampuan dengan cara terorganisir sehingga sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Segala hal mengenai kebijakan mampu ditunjukkan oleh masyarakat umum dan sudah disusun, dilaksanakan, dan dikelola untuk melakukan musyawarah.

Paradigma Administrasi Publik

Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma keenam yaitu paradigma *governance*. Dalam penelitian ini fokus pada strategi pengelolaan perpustakaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo maka paradigma administrasi publik yang digunakan paradigma ke-6 yaitu *Governance*. Karena Dinas Perhubungan sebagai organisasi publik yang mempunyai tugas untuk melayani masyarakat dan mengutamakan kepentingan publik dengan penuh tanggung jawab dalam strategi pengelolaan perpustakaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

Perencanaan Strategis

Proses perencanaan strategis merupakan suatu metode terstruktur untuk merumuskan pernyataan yang jelas tentang posisi suatu organisasi tersebut melakukannya.

Menurut Bryson (2001:55), ada delapan tahapan dalam proses perencanaan strategis yaitu:(1)Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis,(2) Memperjelas mandat organisasi,(3) Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi,(4) Analisis lingkungan internal,(5) Analisis lingkungan eksternal ketrampilan,(6) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi,(7) Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu,(8) Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan

Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan ilmu yang multidisipliner dalam berbagai hal organisasi dan sudah memiliki jangkauan ilmu yang luas. Hal tersebut sudah mempunyai fungsi dalam pengembangan SDM, keuangan, sistem informasi dan politik. (Pasolong, 2007:83) Fungsi yang memiliki keterkaitan dalam proses implementasi manajemen pada organisasi publik. George R Terry telah memberikan empat tugas dalam manajemen utama yang dapat dilihat sebagai berikut:(1)Perencanaan,(2) Pengorganisasian, (3) Pergerakan, (4) Pengawasan.

Manajemen Strategis

Pearce II dan Robinson (2008) mengemukakan bahwa manajemen strategis merujuk pada serangkaian tindakan dan keputusan yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan rencana guna mencapai tujuan perusahaan. Wheelen dan Hunger (2012: 16) menyoroti bahwa analisis lingkungan, pengembangan strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan pengendalian merupakan elemen-elemen kunci dalam manajemen strategis. Solihin (2012: 64) menjelaskan bahwa manajemen strategis melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan terhadap semua putusan dan Tindakan strategis Perusahaan untuk mewujudkan keberhasilan yang maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dengan memberikan gambaran dan uraian berupa, strategi pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dan apa saja tahapan perencanaan strategis dalam menentukan keberhasilan pengelolaan perparkiran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka pada literatur dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala bidang perparkiran, Kepala Seksi Perparkiran, Petugas Parkir dan Masyarakat Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis triangulasi dan menggunakan *software* atlas.ti untuk menemukan relasi dan temuan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Perencanaan Strategi

a. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis

Tahapan pertama untuk menegosiasikan kesepakatan dengan orang penting untuk menentukan keberhasilan pada Dinas Perhubungan yaitu, proses pengambilan keputusan dengan melibatkan serangkaian langkah dan aktivitas pihak yang terkait. Dinas perhubungan dalam hal koordinasi untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan strategis sudah dilaksanakan dengan maksimal, karena dalam hal ini Dinas Perhubungan mampu melibatkan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang efektif dalam pengelolaan perparkiran sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian Dinas Perhubungan juga tidak begitu saja memberikan keputusan, karena seluruh keputusan yang dibuat harus sesuai dengan peraturan. Dalam rangkaian tahapan perencanaan strategis untuk memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah dilaksanakan dengan baik.

b. Memperjelas mandat organisasi

Tahapan perencanaan strategis dalam menentukan keberhasilan Dinas Perhubungan merupakan hal yang sangat penting agar keputusan yang dibuat Dinas Perhubungan tidak menyimpang dari mandat organisasi. Oleh karena itu Dinas perhubungan selalu berpedoman dengan peraturan pengelolaan perparkiran diantaranya peraturan daerah kab purworejo dan peraturan bupati. Keberadaan peraturan sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam peraturan tersebut juga termuat mengenai SOP parkir yang dijadikan landasan petugas parkir untuk memenuhi pertanggungjawaban dalam pekerjaannya. Dengan adanya peraturan daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasan untuk mengatur dan mengelola perparkiran secara transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan bersama. Dalam rangkaian memperjelas mandat organisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah dilaksanakan secara maksimal, dimana peraturan yang dibuat selalu diupdate sesuai dengan kebutuhan.

c. Memperjelas misi dan nilai-nilai Organisasi

Misi dan nilai organisasi diwujudkan dalam bentuk program atau pelayanan. Program yang dibentuk juga harus sesuai dengan misi dan nilai organisasi sehingga pelaksanaan program dalam tahapan perencanaan strategis mampu mencapai tujuan. Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program selalu berpegang dengan aturan yang ada, karena segala permasalahan yang terjadi harus terbuka dengan masyarakat terutama dalam hal keuangan. Peraturan saat ini Dinas Perhubungan sudah tidak menerima uang dari hasil perparkiran, karena seluruh pendapatan parkir langsung diserahkan koordinator parkir ke Bank Jateng. Dengan adanya sistem otomatis berupa *website* E-retribusi menjadi lebih terbuka dan masyarakat bisa mengakses. Keberadaan *system* tersebut juga membantu Dinas Perhubungan untuk menangani permasalahan setoran. Dalam rangkaian memperjelas misi dan organisasi sudah dilaksanakan secara maksimal

d. Analisis Lingkungan Internal

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan untuk pengelolaan perpustakaan sangat terbatas, namun saat ini permasalahan tersebut bukan menjadi masalah utama karena untuk pekerjaan pengelolaan perpustakaan Dinas Perhubungan mempunyai sumber daya diluar Dinas seperti Koordinator parkir dan petugas parkir. Keberadaan sistem *website* e-retribusi juga membantu Dinas Perhubungan dalam menyelesaikan pekerjaan. Analisis lingkungan internal dalam sumber daya manusia belum maksimal untuk manajemen sumber daya, karena kuantitas pegawai yang dimiliki Dinas Perhubungan juga berpengaruh dalam kualitas sumber daya manusia.

Sumber dana anggaran sangat penting dalam pengelolaan perpustakaan Dinas Perhubungan. Anggaran sebagai proses untuk merencanakan dan mengendalikan sebagai upaya perkiraan keuangan yang akan dibutuhkan. Dinas Perhubungan sudah mempunyai rincian untuk anggaran yang dikeluarkan, seperti halnya dana anggaran operasional untuk pengelolaan perpustakaan. Dana operasional yang dimaksud yaitu untuk anggaran cetak karcis dan gaji petugas parkir. Analisis lingkungan internal dalam sumber dana anggaran yang dilakukan sudah dilaksanakan secara baik

Sarana dan prasarana membantu dalam proses kegiatan sehingga tujuan dari kegiatan dapat tercapai. Dalam pengadaannya sarana prasarana yang diberikan Dinas Perhubungan kepada petugas parkir sudah sesuai dengan keperluan seperti, rompi parkir, karcis parkir, topi, peluit. Namun masih terdapat sarana dan prasarana yang kurang yaitu pemberian tempat parkir yang tidak mengganggu lalu lintas. Karena dengan adanya parkir di bahu jalan dan trotoar itu menimbulkan kemacetan pada kendaraan. Dinas Perhubungan perlu memberikan tempat parkir yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Analisis Lingkungan Internal dalam sarana dan prasarana yang dilakukan belum maksimal.

e. Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor politik dalam pengelolaan perpustakaan sebagai tujuan yang bisa dilakukan untuk memberikan pandangan tentang situasi politik pemerintah. Mewujudkan keadaan dengan berbagai kondisi sangat dibutuhkan kestabilan sistem politik sehingga dapat menghindari terjadinya masalah pengelolaan perpustakaan. Dinas Perhubungan bersama dengan pemerintah daerah mempunyai peraturan yang mengikat dalam pengelolaan perpustakaan, seperti peraturan daerah dan peraturan bupati. Dimana setiap tahunnya selalu mengalami perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan perpustakaan. Sedangkan petugas parkir itu hanya bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Analisis lingkungan dalam faktor politik yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah maksimal.

Faktor ekonomi dalam pengelolaan perpustakaan umumnya disebabkan oleh pengangguran. Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mau menjadi petugas parkir untuk membantu Dinas dalam mengelola parkir dan mencapai target retribusi parkir. Dinas perhubungan sudah maksimal dalam memberikan lapangan pekerjaan sebagai petugas parkir, tapi karena kecukupan kebutuhan setiap individu jadi pekerjaan menjadi petugas parkir dianggap masih belum cukup untuk mencukupi kebutuhan sehingga mengharuskan untuk mencari pekerjaan sampingan. Dinas perhubungan sebagai organisasi yang menyediakan lapangan pekerjaan petugas parkir sudah memberikan solusi untuk memberikan kestabilan perekonomian. Analisis lingkungan *eksternal* dalam faktor ekonomi yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah dilaksanakan secara maksimal.

Faktor sosial dalam pengelolaan perpustakaan berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam tahapan perencanaan strategis ini tidak hanya ditujukan kepada Dinas Perhubungan melainkan juga masyarakat, karena mereka berperan aktif

dalam pengelolaan perparkiran dengan keikutsertaan masyarakat, berharap pengelolaan perparkiran supaya lebih tertib dan baik. Dinas Perhubungan juga berperan utama untuk mewujudkan pengelolaan perparkiran yang tertib sehingga mampu mencapai tujuan bersama. Analisis lingkungan eksternal dalam faktor sosial yang dilakukan Dinas Perhubungan Faktor sosial dalam pengelolaan perparkiran belum maksimal, karena dinas perhubungan berperan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya menggunakan transportasi publik dan mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh lahan parkir semakin sedikit, namun masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran sehingga kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan tidak maksimal.

Faktor teknologi sangat berpengaruh untuk keberhasilan tahapan perencanaan strategi pada pengelolaan perparkiran karena mampu memberikan pelayanan yang baru atau meningkatkan yang sudah ada. Inovasi ini dapat menjadi elemen kunci dalam perencanaan strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dinas Perhubungan mampu mengikuti perkembangan teknologi untuk pengelolaan perparkiran. Seperti adanya E-Parkir dan E-Retribusi yang bermanfaat untuk mempermudah keberlangsungan pekerjaan Dinas Perhubungan. Teknologi tersebut bekerja untuk pengelolaan perparkiran supaya lebih efektif dan efisien. Faktor teknologi dalam pengelolaan perparkiran belum maksimal karena *system/ website E-Parkir* belum digunakan sepenuhnya karena masih proses penyempurnaan. Sistem tersebut untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaannya

f. Mengidentifikasi isu strategi yang dihadapi organisasi

Isu strategis adalah masalah atau tantangan yang dapat mempengaruhi kemampuan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuannya

Sehingga diperlukan SOP parkir dan peraturan yang dijadikan pedoman untuk memantau tugas dan kewajibannya. Dinas perhubungan bertanggung jawab dalam pembuatan SOP parkir, petugas parkir juga bertanggung jawab untuk menjalankan SOP tersebut. Karena dengan adanya SOP parkir dan peraturan yang dijadikan landasan itu akan mengurangi terjadi pelanggaran. Sehingga keterlibatan Dinas Perhubungan dan petugas parkir dalam pengelolaan perparkiran sangat penting untuk mengelola isu supaya tidak terjadi permasalahan. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi sudah terlaksana dengan baik dan maksimal karena pihak yang terlibat mampu bekerja sama untuk menghindari terjadinya permasalahan

g. Merumuskan Strategi untuk mengelola isu

Dinas Perhubungan perlu mengembangkan rencana aksi yang terperinci untuk mengatasi dan menghindari adanya permasalahan dalam persoalan pengelolaan perparkiran. Isu yang sering terjadi pada Dinas Perhubungan yaitu kurangnya kesadaran petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya. Karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir. Dinas perhubungan sudah merumuskan strategi dengan cara memberi peringatan kepada petugas parkir yang melakukan pelanggaran tersebut, namun petugas parkir masih sering melakukan kesalahannya lagi. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu yang dilaksanakan Dinas Perhubungan sudah dilaksanakan secara maksimal.

h. Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan

Dinas Perhubungan sudah mewujudkan seluruh implementasi strategi yang sudah direncanakan sehingga sudah mencapai tujuan yang maksimal. Dinas perhubungan dalam setiap kegiatannya selalu beracuan dalam visi dan target. Target pemerintah daerah yang diberikan

dalam pengelolaan perparkiran bisa dibidang sangat tinggi, dan mampu membuktikan dengan pendapatan yang dihasilkan juga tinggi. Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah maksimal karena setiap visi yang dilakukan sudah sesuai dengan target.

2. Strategi Pengelolaan Perparkiran

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam pengelolaan perparkiran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dilakukan dengan bekerja sama dengan akademik, dengan adanya keterlibatan akademik sebagai pihak ketiga itu sangat memberikan pertolongan kepada Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan memberikan pernyataan bahwa sebenarnya bisa untuk melakukan survey sendiri, namun Dinas Perhubungan takut masyarakat tidak percaya. Dalam hal ini tingkat kepercayaan publik kepada Dinas Perhubungan perlu ditingkatkan. Pemahaman dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam pengelolaan perparkiran. Kolaborasi dengan akademik untuk menentukan target dilakukan dengan pengembangan titik parkir baru yang akan memberikan solusi untuk meningkatkan ketersediaan tempat parkir. Masing-masing titik parkir memiliki potensi pendapatan yang berbeda-beda. Pengembangan titik parkir yang telah dilakukan Dinas sudah Perhubungan sudah dilakukan secara maksimal oleh Dinas Perhubungan, karena sudah berusaha untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan bantuan akademik untuk membantu dalam survei potensi pendapatan titik parkir. Untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam hal tarif parkir sudah dilakukan sosialisasi dan pembagian brosur secara resmi oleh pemerintah terkait. Kemudian pengembangan titik parkir dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya parkir liar .

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian diidentifikasi sebagai suatu proses untuk mengelola serta mengatur tugas setiap pekerja agar tujuan dapat tercapai secara efisien. Dalam mengatur pekerja yang terlibat dalam pengelolaan perparkiran Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan petugas parkir secara dua arah. Koordinasi antara pegawai dinas perhubungan dengan petugas parkir itu sangat penting karena menciptakan lingkungan kerja yang teratur, efisien, dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan kinerja petugas parkir di lapangan mampu memberikan setoran sesuai yang ditargetkan dinas perhubungan. Dinas Perhubungan juga melakukan pemerataan dalam pembukaan lapangan pekerjaan sebagai petugas parkir, karena dalam satu titik parkir terdapat dua petugas parkir dengan system bekerja pergantian shift. Dinas Perhubungan juga berkomitmen apabila petugas parkir menemukan permasalahan akan didengarkan dan diselesaikan oleh Dinas Perhubungan dalam bidang pengelolaan perparkiran. Dengan koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan dengan petugas parkir akan berdampak pada kelancaran setoran yang diberikan petugas parkir. Dinas perhubungan dalam kegiatan koordinasi juga melakukan rapat dengan petugas parkir untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam pelayanan. Dalam rangkaian pengorganisasian yang telah dilakukan Dinas Perhubungan sudah dilaksanakan secara baik karena keterlibatan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang sudah berjalan secara maksimal.

c. Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan dalam pengelolaan perparkiran merupakan serangkaian kegiatan yang harus dijalankan oleh suatu organisasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab telah melaksanakan beberapa pergerakan. Pergerakan tersebut

termuat dalam beberapa program yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan perparkiran. Program pertama yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah pembinaan kepada koordinator parkir dan petugas parkir, program tersebut sudah dilakukan secara maksimal karena Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satpol PP dan tim kepolisian. Program selanjutnya yaitu pengawasan dan *monitoring* kegiatan petugas parkir di lapangan hal tersebut dilaksanakan oleh tim gabungan dari Dinas Perhubungan karena petugas parkir rata-rata sumber daya masih rendah sehingga diperlukan *monitoring* langsung di lapangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti, cara berpakaian petugas parkir. Kemudian juga terdapat perjanjian antara Dinas Perhubungan dengan petugas parkir yang berisi kontrak pekerjaan mengenai kesanggupan target setoran harian, perjanjian tersebut ditandatangani diatas materai sebagai bukti sah bahwa petugas parkir itu telah resmi bekerja sama dengan dinas perhubungan. Karena petugas parkir memiliki sumber daya yang rendah dan belum maksimal maka langkah yang diberikan Dinas Perhubungan dengan surat perjanjian itu hal yang benar.

Program selanjutnya Dinas Perhubungan memberikan fasilitas pada petugas parkir dengan memberikan atribut, seragam, topi, peluit, dan karcis. Namun dalam penggunaan karcis masih belum maksimal karena tidak semua petugas parkir memberikan karcis pada orang yang parkir padahal dengan pemberian karcis ini mampu menghindari kecurangan yang dilakukan petugas parkir. Karena petugas parkir ini sering memasang tarif berbeda di beberapa wilayah purworejo, sehingga merugikan bagi masyarakat. Dinas perhubungan juga memberikan perhatian bagi petugas parkir di malam hari dengan memberikan rompi atau seragam dengan reflektif cahaya sehingga bisa memberikan petunjuk bahwa di wilayah tersebut ada kegiatan perparkiran dan memberikan keamanan bagi petugas parkir. Dalam

rangkaian program pergerakan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan sudah dilaksanakan secara maksimal, namun dinas perhubungan perlu fokus dan monitoring pada kegunaan karcis parkir yang telah difasilitasi Dinas Perhubungan kepada petugas parkir, karena masih ada petugas parkir yang menyalahgunakan keberadaan karcis parkir tersebut.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dilakukan terhadap seluruh program yang sudah dilaksanakan dan akan dikaji kedepannya. Dinas Perhubungan melakukan pengawasan langsung dengan *monitoring* dengan membentuk tim gabungan di lapangan. Pengawasan perlu dilakukan karena untuk mengevaluasi titik parkir yang pendapatannya menurun, namun penurunan pendapatan itu bisa disebabkan oleh beberapa indikasi seperti ketidakjujuran yang dilakukan petugas parkir. Dinas Perhubungan juga memberikan kelonggaran bagi petugas parkir, untuk tidak memberikan sanksi bagi petugas parkir yang terlambat dalam setoran. Kemudian pengawasan tidak langsung itu dilaksanakan oleh masyarakat, Dinas Perhubungan berharap bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan perparkiran. Seperti halnya ketika masyarakat parkir itu harus meminta karcis parkir kepada petugas parkir, meskipun petugas parkir tidak memberikan namun masyarakat harus meminta karena satu karcis itu sudah ada hitungannya dan masuk di kas daerah. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan masyarakat juga bisa dilakukan melalui media sosial layanan pengaduan parkir yang sudah disediakan Dinas Perhubungan. Dalam rangkaian pengawasan langsung yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah dilakukan maksimal dengan *monitoring* lapangan bersama koordinator parkir. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan masyarakat sudah dilaksanakan secara maksimal.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Tahapan Perencanaan Strategis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan memiliki delapan tahapan, Sebagian tahapan sudah berjalan secara maksimal dan masih ada yang belum maksimal. Tahapan yang belum maksimal diantaranya analisis lingkungan eksternal pada faktor sosial. Ditunjukkan dengan parameter bahwa Dinas Perhubungan belum mampu menghimbau masyarakat dan petugas parkir untuk meminta dan memberi karcis parkir. Kemudian faktor teknologi yang dilakukan Dinas Perhubungan belum maksimal yang ditunjukkan dengan parameter setoran belum sepenuhnya dilakukan melalui e-retribusi dimana koordinator parkir membuat id billing untuk memasukan pendapatan harian dan disetorkan langsung ke Bank Jateng.

Strategi pengelolaan perparkiran dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, peregerakan, dan pengawasan. Proses strategi pengelolaan perparkiran yang dilakukan masih ada yang belum maksimal dan sudah dilakukan secara maksimal. Perencanaan dalam strategi pengelolaan sudah dilaksanakan secara maksimal dengan melakukan pengembangan lokasi titik parkir di tempat baru. Ditunjukkan dengan parameter lokasi parkir memiliki 7 rayon dan setiap pengembangan lokasi parkir dilakukan bersama akademisi yaitu Universitas Jenderal Soedirman. Pengorganisasian dalam strategi pengelolaan perparkiran dengan pembagian kerja untuk petugas parkir dalam penanganan untuk memperkirakan pendapatan harian rata-rata. Ditunjukkan dengan parameter monitoring pendapatan di lapangan kepada petugas parkir dan evaluasi kontrol untuk menemukan dan menyelesaikan permasalahan.

Pergerakan dilakukan secara maksimal dengan penggantian petugas parkir yang tidak melaksanakan ketentuan tugas yang berlaku. Ditunjukkan dengan parameter Dinas Perhubungan dan petugas parkir memiliki surat perjanjian terkait kesanggupan untuk target pendapatan. Pengawasan sudah berjalan secara maksimal dan dilakukan secara dua arah. Ditunjukkan dengan parameter bahwa petugas parkir masih memiliki SDM yang rendah maka dilakukan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan bersama Tim Kepolisian dan Satpol PP.

2. SARAN

1. Dinas Perhubungan perlu mengawasi proses pemberian karcis parkir yang telah difasilitasi Dinas Perhubungan kepada petugas parkir, karena masih ada petugas parkir yang menyalahgunakan keberadaan karcis parkir tersebut.
2. Dinas Perhubungan pada kawasan tertentu harus beralih ke parkir elektronik sehingga perlu melakukan pelatihan kepada pegawai untuk memberikan pengetahuan terhadap perkembangan teknologi supaya memudahkan dalam melaksanakan pekerjaannya dan meningkatkan kualitas sumber daya pegawai yang dimiliki. Supaya menciptakan pegawai yang kompeten untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kemudian untuk sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dan dikaji supaya badan jalan tidak terganggu dan tidak menyebabkan kemacetan, sehingga Kabupaten purworejo tidak semrawut yang disebabkan oleh perparkiran
4. Dinas Perhubungan harus mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan perparkiran, karena masyarakat sebagai pengguna jasa layanan parkir juga harus memiliki kesadaran untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Litman, T., & Todd Litman Victoria, by. (2023). *www.vtpi.org Info@vtpi.org 250-508-5150 Parking Management Strategies, Evaluation and Planning*. www.vtpi.org
- Anang Pramono, & M. Ali Shodikin. (2022). Implementation of Android-Based Parking Management Applications. *Inform: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 7(1), 81–87. <https://doi.org/10.25139/inform.v7i1.4565>
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194–205. <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i02.1344>
- Cania, M., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Diagnosis, Panduan dan Tindakan Koheren Dalam Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 2(1), 150–163. <https://doi.org/10.47134/rapik.v2i1.21>
- Chullabodhi, C., Chalermpong, S., & Ratanawaraha, A. (2022). Examining the Root Causes of On-Street Parking Mismanagement in Central Bangkok. *Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning*, 21(1), 1–28. <https://doi.org/10.54028/NJ202221207>
- Dwi Puspita Sari, R., & Sadad, A. (2023). Pengawasan Jasa Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru. *JP Dan KP*, 5(1), 1–14. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP>
- Immanuel Panusunan Tua Panggabean, Sirojuzilam, S., Lubis, S., & Purwoko, A. (2022). Parking Management in Supporting Sustainable Development: Systematic Literature Review. *Proceedings Of International Conference On Communication Science*, 2(1), 11–16.
- Jardim, B., Alpalhão, N., Sarmiento, P., & de Castro Neto, M. (2022). The illegal parking score – Understanding and predicting the risk of parking illegalities in Lisbon based on spatiotemporal features. *Case Studies on Transport Policy*, 10(3), 1816–1826. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.07.011>
- Muh Wahyudi Mokobombang. (2022). Efektivitas Pengelolaan Perparkiran Pada Kantor Pd Parkir Makassar Raya Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Journal of Administrative and Social Science*, 3(2), 1–5. <https://doi.org/10.55606/jass.v3i2.11>
- Noviantoro, D., & Ferry Rosando, A. (2023). Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar di Kota Surabaya. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1581–1591.
- Popescu, R. (2022). The culture of parking on the sidewalks. *Cities*, 131(March 2021), 103888. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103888>
- Rahmad, & Nasfi. (2022). Manajemen Strategik Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Dalam Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(3), 252–267. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i3.650>
- Rahmadhia, F., & Herawati, N. R. (2022). Parking Management in Semarang City Viewed from the Perspective of Good Governance (Research Study On Taman Indonesia Kaya). *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 321-335.
- Rusnaedi. (2022). Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Watampone Kabupaten Bone. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 263–271.

- Simatupang, A. N., Siagian, M., & Hadinugroho, D. L. (2022). Parkir di Kawasan Pasar Petisah Medan: Tinjauan Pengelolaan dan Kebijakan. *Perspektif*, 11(4), 1414–1422. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7364>
- Suryana, N. (2019). CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan SENGKARUT KEPENTINGAN AKTOR KEAMANAN (TINJAUAN ATAS DINAMIKA PERUMUSAN UU KEAMANAN NASIONAL). *Core.Ac.Uk*, 5(1), 101–117. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>
- Tangabali, F. A. T., Apriani, F., & Rande, S. (2019). Pengelolaan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Juru Parkir Resmi di Kota Samarinda. *E-Journal Administrasi Negara*, 7(2), 9109–9120. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id ©
- Taylor, D. E. (2021). Free parking for free people: German road laws and rights as constraints on local car parking management. *Transport Policy*, 101(December 2019), 23–33. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.11.013>
- Yan, G. (2022). Operation Concept and Mode Selection Design of Public Parking Lot. *Academic Journal of Science and Technology*, 3(2), 209–213. <https://doi.org/10.54097/ajst.v3i2.2175>

SUMBER BUKU

- Nugroho. (2010). *Perencanaan Strategis in Action*. Elex Media Komputindo.
- Terry, George R. (2008). *Prinsip prinsip manajemen*.
- Syahruman, Ni'mah, Absor, A. (2022). *Manajemen Strategik Dalam Organisasi*. Penerbit NEM.
- Yulivan, I. (n.d.). *Manajemen stratejik*. Jakad Media Publishing.

